

ANALISIS AKUNTANSI ATAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

ANALYSIS OF ACCOUNTING FOR REVENUE AND EXPENDITURE OF CASH IN GENERAL SECRETARIAT BUREAU REGIONAL NORTH SULAWESI PROVINCE

Oleh:
Steven R. Ratela¹

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

email : [1stevenratela@gmail.com](mailto:stevenratela@gmail.com)

Abstrak: Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dalam rangka mewujudkan tata kelola yang baik, dengan memberikan kewenangan yang cukup besar bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis akuntansi apakah Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, telah penerimaan dan pengeluaran kas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu suatu metode pembahasan permasalahan yang sifatnya menggunakan, menggambarkan, dan membandingkan satu data atau keadaan serta melukiskan dan menerangkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Biro Umum telah melakukan proses penerimaan dan pengeluaran kas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Biro Umum Sekda Provinsi Sulawesi Utara sebaiknya mempertahankan pencatatan kas yang sudah tertata untuk tahun anggaran selanjutnya, agar pencatatan kas dapat tetap berjalan dengan baik.

Kata kunci: *analisis akuntansi, penerimaan dan pengeluaran kas.*

Abstract: *Local Government Accounting System is part of the overall financial management. Under PP 24 of 2005 concerning the Government Accounting Standards, in order to realize good governance, by providing a large enough authority for local governments to manage its resources. The aim in this study was to analyze the accounting whether the General Bureau of Regional Secretariat North Sulawesi, has cash receipts and disbursements in accordance with the Regulation of the Minister of the Interior No. 59 Year 2007 on the Amendment Regulation of the Minister of the Interior No. 13 Year 2006 regarding Guidelines for Financial Management. In writing this essay using descriptive analysis method is a method of discussion of issues that are used, describe, and compare the data or the circumstances and describe and explain a situation such that it can be deduced. The results showed that the General Bureau has conducted the process of cash receipts and disbursements in accordance with the Regulation of the Minister of the Interior No. 59 Year 2007 on Amendment to the Regulation of the Minister of the Interior No. 13 Year 2006 regarding Guidelines for Financial Management. Secretary General Bureau of North Sulawesi province should maintain records of cash that has been arranged for the next fiscal year, so that the recording of cash can still run well.*

Keywords: *accounting analysis, cash receipts and disbursements.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah suatu negara yang sukses dipengaruhi oleh ada tidaknya karakter *Good Governance*. *Good Governance* merupakan praktek analisis kewenangan berbagai urusan penyelenggaraan negara secara politik ekonomi dan administratif disemua tingkatan. Dalam perubahan sistem pemerintah dari sistem sentralisasi menjadi desentralisasi pada bentuk ekonomi daerah telah memberi dampak besar pada sistem penyelenggaraan pemerintah dan ruang lingkup kinerja. Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk lebih memberikan pelayanan publik yang didasarkan pada asas-asas pelayanan publik yang meliputi transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak, serta keseimbangan hak dan kewajiban demi tercapainya *Good Governance*.

Transparansi merupakan suatu situasi dimana masyarakat dapat mengetahui dengan jelas semua kebijaksanaan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam menjalankan fungsinya beserta sumber daya yang digunakan. Sedangkan akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintah semakin meningkat, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Partisipasi artinya warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun lembaga - lembaga perwakilan yang sah mewakili kepentingan mereka.

Akuntansi merupakan suatu sistem untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan oleh para pemakainya dalam pengambilan keputusan. Keterampilan matematis sekarang ini telah berperan dalam menganalisis permasalahan keuangan yang kompleks. Begitu pula dengan kemajuan dalam teknologi komputer akuntansi yang memungkinkan informasi dapat tersedia dengan cepat.

Pemerintahan provinsi Sulawesi utara merupakan organisasi non profit yang memiliki tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai bidang. Pemerintah menggunakan Sistem Akuntansi Pemerintahan yang telah banyak mengalami perkembangan yang diikuti dengan perubahan dasar hukum. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu Pemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara. Dalam melaksanakan proses akuntansi Biro Umum melakukan pencatatan kas yaitu proses penerimaan dan pengeluaran kas. Kemajuan pemerintahan saat ini akan mempengaruhi Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk Menganalisis Akuntansi atas Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Akuntansi

American Accounting Association yang dikutip oleh Soemarso (2009:3), mendefinisikan akuntansi sebagai suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan proses identifikasi/pengenalan, pengukuran, dan pelaporan ekonomi yang diharapkan berguna dalam pengambilan keputusan bagi pihak yang memerlukannya. Smith dan Skousen (2004:3), mendefinisikan akuntansi sebagai aktivitas jasa, fungsinya adalah untuk menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas yang dipandang akan bermanfaat untuk pengambilan keputusan dalam menetapkan pilihan yang tepat diantara alternatif tindakan.

Konsep Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi keuangan daerah mempunyai dua pengertian, pengertian yang pertama mengacu pada kegiatan administrasi atau pengurusan keuangan daerah, sehingga akuntansi keuangan daerah lebih diartikan sebagai tata usaha keuangan atau tata buku. Pengertian yang kedua mengacu pada kegiatan penyediaan informasi dalam bentuk laporan keuangan bagi pihak eksternal dari Pemerintah Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Undang-undang No 8 tahun 2005 dan Undang-undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan ini memberikan kewenangan yang cukup besar bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya.

Akuntansi Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Struktur Pemerintah Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan kerja tersebut. Menurut Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dalam kontribusi keuangan daerah. Pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan akuntansi SKPD adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD
3. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dapat dijelaskan dengan rinci melalui siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan tahap-tahap yang ada dalam sistem akuntansi. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Analisis Transaksi
Soemarso (2009:91) mendefinisikan bukti transaksi adalah dokumen yang berisi data transaksi untuk kebutuhan pencatatan keuangan.
2. Jurnal
Triati (2013:27) mengemukakan jurnal umum adalah bentuk buku harian dua kolom yang digunakan untuk mencatat transaksi kedalam nama perkiraan atau akun dan jumlah yang harus di debit dan kredit secara kronologis.
3. Posting ke Buku Besar
Sadeli (2014:46) menjelaskan, setelah selesai menjurnal tahap berikutnya adalah memindahkan setiap ayat jurnal pada masing-masing perkiraan pekerjaan ini disebut posting (*Ledger*). Pemindah-bukuan (*Posting*) berarti pemindahan jumlah uang dari jurnal ke perkiraan-perkiraan yang bersangkutan dalam buku besar.
4. Neraca Saldo
Triati (2013:38) menjelaskan, neraca saldo adalah suatu daftar yang berisikan saldo masing-masing perkiraan dibuku besar.
5. Jurnal Penyesuaian
Sadeli (2014:17) menyatakan, buku jurnal penyesuaian dapat disusun berdasarkan catatan pada lajur penyesuaian yang terdapat pada neraca lajur. Jurnal penyesuaian dicatat juga dalam jurnal umum dengan suatu penjelasan bahwa jurnal tersebut adalah jurnal penyesuaian.
6. Neraca Saldo Setelah Penyesuaian
Apabila dalam penyesuaian muncul perkiraan baru, maka perkiraan baru tersebut dimasukkan dalam neraca saldo setelah penyesuaian.
7. Laporan Keuangan
Sadeli (2014:18) menjelaskan, Laporan Keuangan adalah laporan tertulis yang memberikan info kuantitatif tentang posisi keuangan dan perubahan-perubahannya serta hasil yang dicapai dalam periode tertentu.

Kas

Kas adalah uang tunai serta saldo rekening giro yang tidak dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan entitas pemerintah daerah. Kas terdiri atas uang kertas, uang logam, dan simpanan di bank dalam bentuk rekening giro (*demand deposit atau checking account*). Kas diakui sebesar nilai nominal dari uang tunai atau yang dapat dipersamakan dengan uang tunai, serta rekening giro di bank yang tidak dibatasi penggunaannya (Darise, 2008:61).

Akuntansi Penerimaan Kas

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah antara lain diperoleh dari transaksi berikut ini:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah antara lain meliputi penjualan aset daerah yang dipisahkan, penerimaan bunga deposito, penerimaan jasa giro, denda keterlambatan pelaksanaan kegiatan.

Akuntansi Pengeluaran Kas

Akuntansi pengeluaran kas merupakan akuntansi yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pengeluaran kas. Penatausahaan pengeluaran kas merupakan serangkaian proses kegiatan menerima, menyimpan, menyetor, membayar, menyerahkan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang yang berada dalam pengelolaan SKPKD (Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah) dan/atau SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Sistem akuntansi pengeluaran kas adalah serangkaian proses mulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan pengeluaran kas pada SKPD dan/atau pada SKPKD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi (Mahmudi 2011:229). Uang persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.

Peneliti Terdahulu

Harianja (2008) dengan judul Penerapan Akuntansi Pemerintahan Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Toba Samosir. Tujuannya untuk mengetahui apakah sistem akuntansi pemerintahan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir. Metode yang digunakan deskriptif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penatausahaan terhadap penerimaan dan pengeluaran kas sudah di sesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

Tuerah (2013) dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Kas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa Tenggara. Tujuannya untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan system dan prosedur penerimaan dan pengeluaran kas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa Tenggara. Metode yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitiannya yaitu sistem dan prosedur telah dilaksanakan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif. Penelitian deskriptif memiliki alternatif tujuan antara lain untuk mengetahui pelaksanaan suatu aturan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan Juni 2014-September 2014.

Prosedur Penelitian

Dalam upaya menganalisis pencatatan kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara)

Metode Pengumpulan Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Menurut Kuncoro (2009:145) jenis data dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Data Kuantitatif adalah data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka).
2. Data Kualitatif adalah data yang dapat diukur dalam skala numerik. Namun karena dalam statistik semua data harus dalam bentuk angka, maka data kualitatif umumnya dikuantitatifkan agar data dapat diproses lebih lanjut.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Riset Lapangan (*field research*)
 - a. Wawancara
 - b. Observasi
2. Riset Pustaka (*library research*)

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Yaitu suatu metode pembahasan permasalahan yang sifatnya menggunakan, menggambarkan, dan membandingkan satu data atau keadaan serta melukiskan dan menerangkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan dan saran.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mempelajari struktur organisasi serta tugas dan tanggungjawab yang ada pada Biro Umum Sekretariat Daerah Sulawesi Utara.
2. Memperoleh gambaran umum mengenai analisis akuntansi dan pelaporan keuangan pada Biro Umum Sekretariat Daerah Sulawesi Utara.
3. Mengetahui dan Mempelajari akuntansi dan pelaporan keuangan Biro Umum Sekretariat Daerah Sulawesi Utara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pencatatan Kas terjadi karena adanya pendapatan dan pengeluaran dana yang terjadi dalam proses akuntansi suatu SKPD. Di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara proses pencatatan kas yang terjadi memakai 2 (dua) sistem pencatatan Akuntansi, yaitu sebagai berikut:

1. *Acrual Basic*

Sistem pencatatan *Acrual Basic* adalah pencatatan yang dilakukan setiap terjadi transaksi/ pengakuan atas transaksi. Pencatatan ini tidak menunggu sampai terjadi perubahan atas kas, tapi dicatat dalam waktu terjadinya transaksi. Transaksi yang dimaksud, contohnya pendapatan dan beban. *Acrual Basic* juga disebut penyandingan pendapatan dan biaya pada periode disaat terjadinya. *Acrual Basic* mendukung penggunaan anggaran sebagai teknik pengendalian.

2. *Cash Basic*

Sistem Pencatatan *Cash Basic* adalah pencatatan akan transaksi yang terjadi ketika transaksi itu mempengaruhi bertambahnya atau berkurangnya kas. Artinya pendapatan diakui ketika kas diterima sedangkan beban diakui pada saat kas dibayarkan artinya mencatat beban didalam transaksi jurnal entry ketika kas dikeluarkan atau dibayarkan dan pendapatan dicatat ketika kas masuk atau diterima.

Pencatatan Pendapatan Penerimaan Kas (di bendahara penerimaan)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan disebutkan bahwa pendapatan adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 disebutkan bahwa pendapatan adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya. Akuntansi pendapatan SKPD dilakukan hanya untuk mencatat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berada dalam kewenangan SKPD, dan dirinci menurut organisasi, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan.

Proses pencatatan transaksi pendapatan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan -Satuan Keuangan - Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) adalah sebagai berikut:

1. PPK-SKPD mencatat pendapatan dalam buku jurnal setelah menerima dokumen sumber dari bendahara penerimaan berupa SPJ penerimaan dan lampirannya.
2. Pendapatan yang diterima oleh bendahara penerimaan SKPD kemudian disetor ke rekening Kas

Daerah (Kasda), bendahara penerimaan diwajibkan menyetorkan hasil pendapatan daerah tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 hari kerja setelah uang diterima, kecuali dalam keadaan tertentu.

Pendapatan di lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara hanya meliputi sewa gedung dan pihak yang terlibat hanya Bendahara Penerimaan. Dalam proses pencatatan pendapatan sewa gedung, dokumen dan catatan yang digunakan oleh Bendahara Penerimaan adalah STS (Surat Tanda Setoran) dan BKU (Buku Kas Umum). Proses pencatatan pendapatan di lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada.

Pencatatan Pengeluaran Kas (di bendahara pengeluaran)

Pengeluaran pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara di bagi dalam beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Belanja Operasi yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai, yakni belanja yang berhubungan langsung dengan pegawai yang ada di lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara berupa gaji dan tunjangan, honor, serta belanja pegawai lainnya yang bersifat variabel atau tidak tetap.
 - b. Belanja barang, merupakan pengeluaran untuk penyediaan Barang dan Jasa antara lain Biaya Alat Tulis Kantor, Biaya Cetak dan Penggandaan, Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor, Biaya Telepon, Biaya Perjalanan Dinas, biaya BBM, biaya jasa servis dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor, belanja makanan dan minuman, dan lain sebagainya.
2. Belanja Modal yaitu belanja untuk pengadaan peralatan dan mesin (aset tetap), antara lain adalah komputer, laptop, printer, mesin hitung, meja kerja dan kursi kerja, lemari arsip, meja komputer, dan lain sebagainya.

Proses pencatatan transaksi pendapatan oleh Pejabat Penatausahaan kas di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara terdiri atas:

1. PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas mencatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Bukti transaksi yang dimaksud yaitu: SP2D, Bukti Transfer, nota debit, bukti pengeluaran lainnya.
2. PPK-SKPD secara periodik atau berkala melakukan posting dari buku jurnal ke buku besar.
3. PPK-SKPD membuat buku besar pembantu yang berfungsi sebagai rincian dan kontrol buku besar.
4. Pencatatan ke dalam buku jurnal pengeluaran kas, buku besar dan buku besar pembantu.

Pembahasan

Evaluasi Pencatatan Pendapatan Kas

Penelitian di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, peneliti melihat bahwa pencatatan pendapatan kas telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah berjalan baik sehingga proses yang berjalan dalam pencatatan kas di Biro Umum Sekretariat Daerah dapat efektif dan efisien.

Evaluasi Pencatatan Pengeluaran Kas

Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara juga sudah menerapkan siklus akuntansi mulai dari pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal, posting ke buku besar masing-masing perkiraan. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara juga sudah menggunakan format yang terdapat dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

a. Akuntansi Belanja

Berdasarkan hasil penelitian, Akuntansi Belanja yang ada di Biro umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku sehingga kegiatan akuntansi yang terjadi dapat berjalan secara efisien dan dilakukan sebagaimana peraturan yang berlaku .

b. Akuntansi Aset

Berdasarkan hasil penelitian, Akuntansi Aset yang ada di Biro umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku sehingga kegiatan akuntansi yang terjadi dapat berjalan secara efisien dan dilakukan sebagaimana peraturan yang berlaku.

Evaluasi Jurnal Pencatatan Pendapatan Kas

Penelitian di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, peneliti melihat bahwa Jurnal pencatatan pendapatan kas telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah berjalan baik sehingga proses yang berjalan dalam pencatatan kas di Biro Umum Sekretariat Daerah dapat efektif dan efisien. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara juga sudah menerapkan siklus akuntansi mulai dari pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal, posting ke buku besar masing-masing perkiraan. Tapi dalam proses ini Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara tidak membuat Neraca, karena Neraca dibuat di Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara (BPK-BMD).

Evaluasi Jurnal Pencatatan Pengeluaran Kas

Setelah melakukan penelitian di Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, peneliti melihat bahwa Jurnal pencatatan pengeluaran kas telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan telah berjalan baik sehingga proses yang berjalan dalam pencatatan kas di Biro Umum Sekretariat Daerah dapat efektif dan efisien. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara juga sudah menerapkan siklus akuntansi mulai dari pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal, posting ke buku besar masing-masing perkiraan. Tapi dalam proses ini Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara tidak membuat Neraca, karena Neraca dibuat di Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Utara (BPK-BMD).

Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya pada Harianja (2008) yang menyatakan bahwa Sistem Akuntansi pemerintahan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Pemerintahan Kabupaten Toba Samosir, telah dilaksanakan sudah sesuai dengan aturan. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Tuerah (2013) yang menyatakan bahwa Sistem dan Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Kas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa Tenggara, sudah efektif dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari dua penelitian sebelumnya mendapat hasil yang sama dengan penelitian analisis akuntansi atas penerimaan dan pengeluaran kas pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah efektif dan telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PENUTUP**Kesimpulan**

Kesimpulan penelitian adalah:

1. Pencatatan Pendapatan dan Pencatatan Beban
 - a. Pencatatan Pendapatan
Kegiatan pencatatan tersebut dilakukan oleh PPK-BU berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara penerimaan kas
 - b. Pencatatan Beban
Kegiatan pencatatan tersebut dilakukan oleh PPK-BU berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara pengeluaran
2. Pengakuan Pendapatan dan Beban
Kegiatan pengakuan tersebut dilakukan oleh bendahara penerimaan dan pengeluaran kas sebelum menyerahkan dokumen untuk di catat pada PPK-BU.

Saran

Saran yang dapat diberikan adalah:

1. Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam pengelolaan keuangan daerah telah berpedoman sepenuhnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) No. 59 Tahun 2007 dan agar pencatatan kas yang telah tertata dengan baik ini di pertahankan untuk tahun anggaran selanjutnya.
2. Jika ada penelitian selanjutnya maka dapat menggunakan PP atau PERMENDAGRI yang sudah dilakukan perubahan sesuai dengan waktu penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Darise, Nurlan. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah (Akuntansi Sektor Publik)*. PT. Indeks, Jakarta.
- Harianja Riodmar, 2008. Penerapan Akuntansi Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pemerintah Kabupaten Toba Samosir, *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan. <http://repository.usu.ac.id/bitstream/1234567/9406/1/09E01148/pdf>. Diakses tanggal 15 September 2015, Hal. 22-59.
- Kuncoro, Mudrajat. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Edisi ketiga. Erlangga, Jakarta.
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press, Yogyakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah*, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2007. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta.
- Sadeli, H. Lili. M. 2014. *Dasar-dasar Akuntansi*. Remaja Rosdakarya, Jakarta.
- Smith, M and Fred Skousen. 2004. *Akuntansi Intermediate*. Erlangga, Jakarta.
- Soemarso, S.R. 2009. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Edisi Kelima. Salemba Empat, Jakarta.
- Triati, Novi. 2013. *Pengantar akuntansi*. PT Indeks, Jakarta.
- Tuerah, Fretty Sofia. 2013. Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Kas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Minahasa Tenggara. *Jurnal EMBA*. Vol.1, No.3. (2013). <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/2059>. Diakses tanggal 18 Oktober 2015. Hal. 356-475.